



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR



LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2025



KABUPATEN BLITAR
"BERDAYA & BERJAYA"



dispendukapilblitarkab



(0342) 801566



dispendukapil.blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan perkenannya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2021–2026 serta Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Tahun 2025–2029. LKjIP Tahun 2025 memuat informasi mengenai target, tujuan, sasaran, serta strategi dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar serta para pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan kinerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke depan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Blitar, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR



IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Ringkasan Capaian Kinerja: Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, dan Persentase Realisasi

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun anggaran berjalan secara umum telah mencapai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari capaian realisasi keuangan sebesar 96,24% dari total pagu anggaran Rp9.741.294.450,00, dengan realisasi sebesar Rp9.374.723.715,20.

Sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah* didukung melalui *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, yang mencapai realisasi anggaran sebesar 95,17%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan, termasuk administrasi perkantoran dan dukungan operasional, telah berjalan efektif dan mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* dilaksanakan melalui beberapa program utama, yaitu *Program Pendaftaran Penduduk*, *Program Pencatatan Sipil*, *Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*, dan *Program Pengelolaan Profil Kependudukan*. Seluruh program tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran yang tinggi, masing-masing sebesar 97,90%, 97,08%, 98,88%, dan 97,79%. Tingginya tingkat realisasi ini menggambarkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja, target, dan realisasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dispendukcapil telah berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik serta dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

B. Ringkasan Kendala dan Langkah ke Depan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi kinerja dan realisasi anggaran. Kendala tersebut antara lain belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang operasional, keterbatasan kapasitas SDM di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, serta perbedaan implementasi standar pelayanan yang berdampak pada belum meratanya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain itu, pada aspek pengelolaan data dan sistem informasi, penerapan standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) memerlukan dukungan sumber daya yang besar, baik dari sisi anggaran maupun SDM. Pada *Program Pengelolaan Profil Kependudukan*, kendala utama berupa keterbatasan ketersediaan data yang dirilis secara semesteran, serta proses penyusunan profil yang masih dilakukan secara manual karena belum tersedianya aplikasi pengelolaan yang terintegrasi.

Sebagai langkah ke depan, Dispendukcapil akan melakukan penguatan perencanaan dan penetapan prioritas anggaran, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan data kependudukan. Selain itu, direncanakan pengembangan atau pengusulan aplikasi pendukung pengelolaan profil kependudukan, peningkatan koordinasi lintas bidang dan lintas level pemerintahan, serta penguatan sosialisasi standar pelayanan kepada masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja Dispendukcapil pada periode selanjutnya dapat semakin optimal, baik dari sisi kualitas pelayanan publik, akurasi data kependudukan, maupun efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	1
	IKHTISAR EKSEKUTIF	2
	DAFTAR ISI	4
	DAFTAR TABEL	5
	DAFTAR GAMBAR	6
BAB I	PENDAHULUAN	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
	B. REALISASI ANGGARAN	68
BAB IV	PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	8
Tabel 1.2	Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	9
Tabel 1.3	Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah)	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	15
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Tahun 2025	15
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tujuan Organisasi	17
Tabel 3.2	Perkembangan Kinerja Sasaran Strategis I	18
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Target Akhir Renstra	20
Tabel 3.4	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga	22
Tabel 3.5	Alasan penunjang keberhasilan maupun keterbatasan pencapaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
Tabel 3.6	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	43
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Sasaran II	53
Tabel 3.8	Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	55
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Pencatatan Sipil Terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029	56
Tabel 3.10	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga	57
Tabel 3.11	Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	59
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65
Tabel 3.13	Realisasi Keuangan	69
Tabel 3.14	Analisis Permasalahan, Kendala, dan Upaya Penyelesaian Realisasi Keuangan	69
Tabel 4.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	74
Tabel 4.2	Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja	75
Tabel 4.3	Rencana Tindak Lanjut	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Duspendukcapil Kab. Blitar	8
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Perangkat Daerah	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

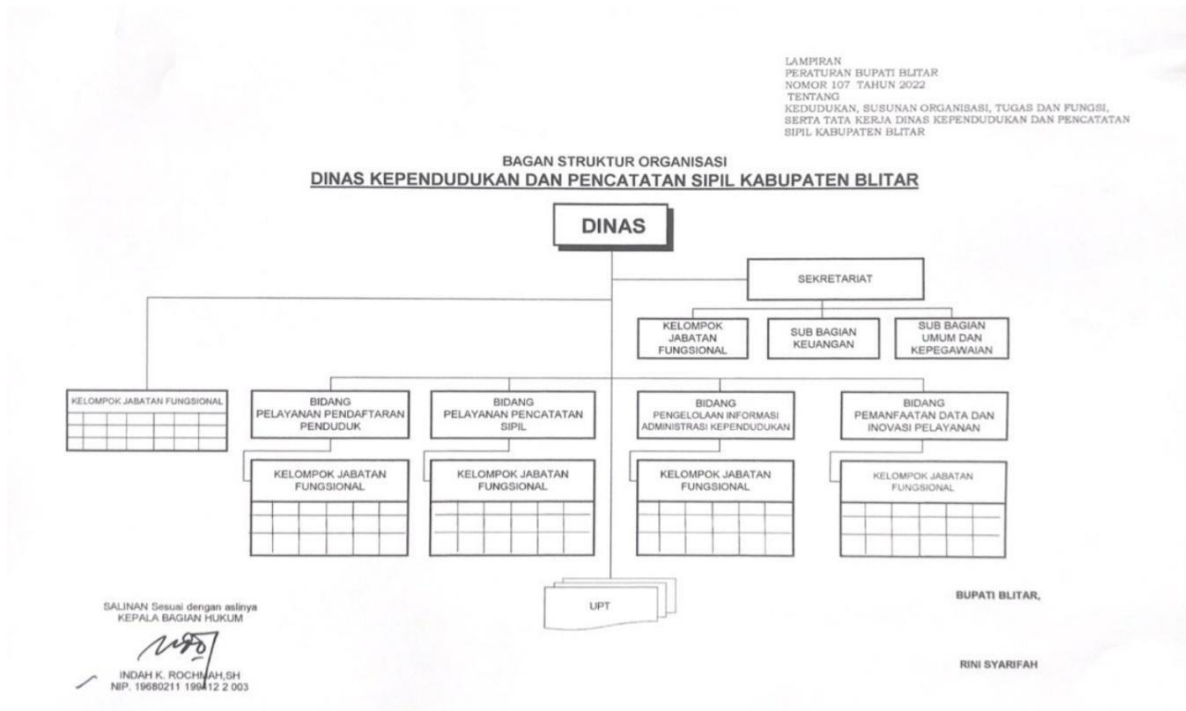
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dispendukcapil Kab. Blitar



Sumber : Perbup 107 Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 72 Orang yang terdiri dari ASN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Administrator	5
3	Pengawas	2
4	Pelaksana	7
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda	8
6	Jabatan Fungsional Mahir	1
7	PPPK	48
	Total	72 Orang

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

B. Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat Misi yang harus dilaksanakan. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada misi ke-3, yaitu : “Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat”, dengan Sasaran Ke-11 : yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja : “Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) (Skala 0-100)”.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dapat diuraikan permasalahan pembangunan / issue strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 1.2
Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Sarana dan Prasarana belum optimal	Data kependudukan, khususnya penduduk miskin, bersifat sangat dinamis, sehingga updating data secara berkala untuk penyediaan data kebijakan yang bersifat real time masih belum optimal.	Perkembangan Teknologi Digital menuntut penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, mobile, dan terintegrasi.	Penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dampak Dispendukcapil harus memperkuat pengamanan database kependudukan.	Perpindahan penduduk antar wilayah yang cepat dan dinamis membuat peningkatan kebutuhan layanan pindah datang, update data domisili, dan penerbitan KTP.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Adminduk
	Keterbatasan SDM pengelola Adminduk				Digitalisasi dan Transformasi Layanan Adminduk	
	Kesadaran masyarakat masih rendah				Implementasi Identitas Kependudukan Digital	
	Sosialisasi ke masyarakat belum optimal				Perlindungan dan Keamanan Data Pribadi Penduduk	
					Akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil	

Sumber: Renstra Dinas Dukcapil, 2025-2029

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut di atas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 di atas, maka ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah “Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien” dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

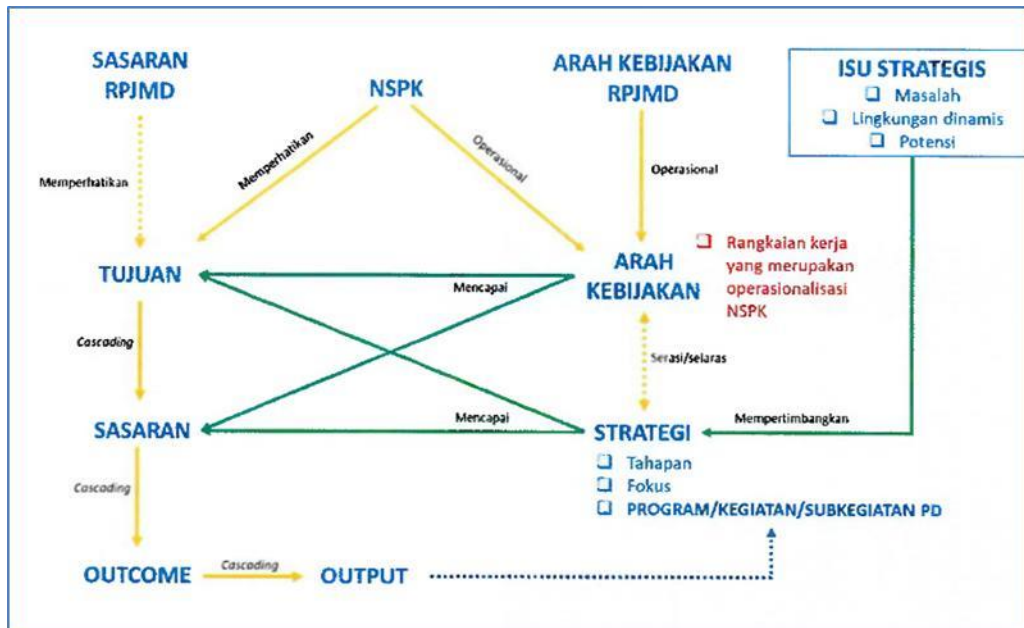
Tabel 1.3
Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah)

No.	Tujuan		Indikator Kinerja
	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	...		Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sumber : Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025-2029

Logical Framework keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut:

Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Perangkat Daerah



Sumber : Inmen Nomor 2 Tahun 2025

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

- Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
 9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E) sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 103 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 103/E);

10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 113/E).

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP EI	98,75%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	94%
3	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (SAKIP OPD)	Nilai SAKIP OPD	B

Sumber : Dinas Dukcapil, 2025

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	66,19%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,00%.

Sumber : Dinas Dukcapil, 2025

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.607.727.542,- dengan rincian sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	932.985.000,-
		Pencatatan Sipil	26.774.832,-
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.154.287.085,-
		Pengelolaan Profil Kependudukan	3.360.000,-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	6.490.317.625,-
Total Anggaran			9.607.727.542,-

Sumber : Dinas Dukcapil, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025.

1. Sasaran I, *Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, dari RPJMD Tahun 2021–2026 menuju RPJMD Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut berdampak pada adanya penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja, termasuk pada Sasaran Strategis I yaitu “*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*”. Penyesuaian indikator

dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan pengukuran kinerja dengan dokumen perencanaan yang baru, sehingga capaian kinerja tetap relevan dan terukur secara komprehensif.

Tabel 3.2. Perkembangan Kinerja Sasaran Strategis I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun n	Realisasi Tahun n	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n-2
A	Sebelum Perubahan					
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan KTP-el	98,75%	99,49%	99,75%	99,53%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	94,00%	98,60%	97,81%	96,95%
B	Sesudah Perubahan					
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66,19%	67,86%	65,26%	62,48%

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Persentase dokumen KTP EI, KIA, Akta Kelahiran, IKD : Rumus : jumlah KTP EI, KIA, Akta Kelahiran / jumlah wajib 3 dokumen x 100% dan dirumuskan dalam Defnisi operasional adalah Persentase (KTP EI + IKD + KIA + Akta Kelahiran) / 4.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, pada indikator sebelum perubahan, capaian kinerja Sasaran Strategis I menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target. Persentase kepemilikan KTP-el pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 99,49%, lebih tinggi dari target 98,75%, serta relatif stabil dan tinggi dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Demikian pula pada indikator persentase kepemilikan akta kelahiran yang mencapai 98,60%, jauh melampaui target 94,00% dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah berjalan efektif dan

menjangkau sebagian besar penduduk.

Seiring dengan berlakunya penyesuaian indikator pada masa transisi RPJMD, Sasaran Strategis I selanjutnya diukur menggunakan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai indikator yang lebih komprehensif. Pada indikator sesudah perubahan, realisasi Tahun 2025 mencapai 67,86%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 66,19%, serta menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi Tahun n-1 sebesar 65,26% dan Tahun n-2 sebesar 62,48%. Peningkatan ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi perubahan indikator, kinerja Dispendukcapil tetap menunjukkan tren positif.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis I tersebut didukung oleh peningkatan kualitas layanan serta penerapan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kemudahan akses, percepatan layanan, dan pemerataan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sehingga berdampak positif pada peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis I pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tetap berjalan efektif dan berkelanjutan, meskipun berada dalam masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Ke depan, capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian target kinerja pada RPJMD Tahun 2025–2029.

1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target Akhir Renstra

Capaian kinerja Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*” berdasarkan target akhir Rencana Strategis (Renstra) diukur melalui indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun perbandingan antara target akhir Renstra dan realisasi kinerja Tahun n dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,95%	67,85%	93%

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun n mencapai **67,85%** dari target akhir Renstra sebesar **72,95%**, dengan tingkat capaian kinerja sebesar **93%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan Sasaran Strategis berada pada kategori **baik** dan telah mendekati target akhir yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Belum tercapainya target akhir Renstra secara penuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, keterbatasan akses pelayanan bagi kelompok masyarakat tertentu, serta dinamika perubahan indikator kinerja pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan adanya kemajuan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Ke depan, upaya percepatan pencapaian target akhir Renstra akan terus dilakukan melalui optimalisasi inovasi pelayanan administrasi

kependudukan, peningkatan pemanfaatan layanan berbasis digital, penguatan layanan jemput bola bagi penduduk rentan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal pada periode perencanaan berikutnya.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten/Kota Tetangga

Capaian kinerja Kabupaten Blitar pada sasaran strategis *Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* yang diukur melalui indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KTP-el, IKD, KIA, dan Akta Kelahiran) mencapai **68,08%**.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian Kabupaten Blitar sedikit lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Timur yang sebesar **68,29%**, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Blitar telah sejalan dengan rata-rata capaian provinsi.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga, capaian Kabupaten Blitar setara dengan Kabupaten Malang yang juga mencapai **68,08%**, serta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kediri (65,71%) dan Kabupaten Tulungagung (65,38%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Blitar berada pada posisi cukup kompetitif di tingkat regional.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2025, yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian empat dokumen utama (KTP-el, IKD, KIA, dan Akta Kelahiran), capaian Kabupaten Blitar masih berada di bawah target nasional. Perbedaan ini antara lain dipengaruhi oleh variasi tingkat kepemilikan masing-masing jenis dokumen, khususnya pada dokumen Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang secara nasional targetnya sudah terpasang tinggi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah

berjalan dengan baik dan konsisten, serta berada pada kisaran capaian provinsi dan di atas beberapa kabupaten tetangga. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan dan inovasi pelayanan, khususnya dalam percepatan kepemilikan dokumen kependudukan tertentu, guna mendukung peningkatan capaian kinerja agar dapat melampaui rata-rata provinsi dan nasional pada periode berikutnya.

Tabel 3.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

NO.	DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1	Kab. Blitar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KTP el, KIA, IKD, Akta Kelahiran)	68,08
2	Nasional			71,60 (<i>Target Nasional</i>)
3	Prov. Jatim			68,29
4	Kab. Malang			68,08
5	Kab. Kediri			65,71
6	Kab. Tulungagung			65,38

Sumber: Prov Jatim Januari 2026

1.3. Upaya dalam Mengungkit Kinerja Sasaran Strategis I

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mengungkit kinerja Sasaran Strategis I agar mencapai target yang diharapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dan akan terus melakukan berbagai upaya strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, perluasan jangkauan layanan, serta penguatan tata kelola. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Optimalisasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, seperti pemanfaatan layanan Lapak Sarah, Lapak Maini, Si Jaran Ijo, dan E-SIAP Online untuk mempercepat proses pelayanan, mempermudah akses masyarakat, serta menjangkau penduduk yang selama ini mengalami keterbatasan akses layanan.

2. Peningkatan layanan jemput bola, khususnya bagi penduduk rentan dan wilayah dengan akses terbatas, guna memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap.
3. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi, melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi pelayanan.
4. Peningkatan kompetensi dan integritas aparatur, melalui pembinaan, pengawasan internal, serta penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan publik sejalan dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
5. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah desa/kelurahan, fasilitas kesehatan, serta perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen kependudukan.
6. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan layanan adminduk yang tersedia.

1.4. Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian Sasaran Strategis I, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja, antara lain:

1. Masih adanya penduduk yang sulit dijangkau, seperti penduduk rentan, berpindah-pindah domisili, atau tinggal di wilayah dengan akses geografis terbatas.
2. Keterbatasan literasi digital masyarakat, yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis online.
3. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia maupun dukungan sarana dan prasarana pelayanan.

4. Dinamika perubahan indikator kinerja dan regulasi, khususnya pada masa transisi RPJMD, yang memerlukan penyesuaian dalam pengukuran dan pelaksanaan kinerja.
5. Kualitas dan validitas data kependudukan, yang masih memerlukan pemutakhiran berkelanjutan akibat perubahan status penduduk (lahir, mati, pindah datang).
6. Tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata, terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan secara mandiri dan tepat waktu.

1.5. Analisis Program dan Kegiatan dalam Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Dalam menunjang keberhasilan maupun keterbatasan pencapaian kinerja Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*”, pelaksanaan sasaran tersebut didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah

Tabel 3.5.

Alasan penunjang keberhasilan maupun keterbatasan pencapaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non Rentan	Dokumen	150	206 (jumlah orang terdata)	Realisasi melebihi target karena optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan meningkatnya partisipasi masyarakat.
2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	100	100	Target tercapai karena seluruh dokumen pendaftaran

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang Diproses				penduduk diproses sesuai standar pelayanan.
2.1.1	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	100	206 (jumlah orang terdata)	Realisasi melebihi target karena pendataan aktif penduduk non permanen dan rentan adminduk.
2.1.2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	12.000	289.818	Realisasi melebihi target karena tingginya permohonan pencatatan dan penerbitan dokumen.
2.1.3	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	50	78	Realisasi melebihi target karena meningkatnya penyelesaian permasalahan pendaftaran penduduk.
2.1.4	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1056	1.094	Realisasi melebihi target karena peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
2.1.5	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	12.000	138.779	Realisasi melebihi target karena meningkatnya pelaporan peristiwa kependudukan.
2.1.6	Sub Kegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa	Laporan	12.000	138.779	Realisasi melebihi target karena meningkatnya jumlah laporan

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kependudukan	Kependudukan				peristiwa kependudukan.
2.1.7	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	12.000	138.779	Realisasi melebihi target karena meningkatnya penerbitan dokumen kependudukan.
2.1.8	Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	2	2	Target tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan.
2.2	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Blangko dan Formulir Kependudukan yang Disediakan	%	100	100	Target tercapai karena ketersediaan blangko dan formulir terpenuhi sesuai kebutuhan.
2.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	2	2	Target tercapai karena dokumen tata cara penyelenggaraan berhasil disusun.
2.2.2	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan	Dokumen	12.000	0	Tidak terealisasi karena tidak terdapat kebutuhan pengadaan pada tahun berjalan.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kebutuhan yang Tersedia				
2.3	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase laporan koordinasi yang disusun	%	100	100	Target tercapai karena koordinasi dan fasilitasi pelayanan berjalan optimal.
2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kot a dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kot a dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	Target tercapai karena koordinasi lintas instansi terlaksana sesuai rencana.
2.3.2	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	50	48	Target belum tercapai karena keterbatasan cakupan pelayanan aktif di lapangan.
2.3.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	12	12	Target tercapai karena fasilitasi pendaftaran penduduk dilaksanakan sesuai rencana.
2.3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen	52	66	Realisasi melebihi target karena meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3.5	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	Target tercapai karena kegiatan sosialisasi terlaksana sesuai jadwal.
2.3.6	Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	2	Target tercapai karena kerja sama dilaksanakan sesuai perencanaan.
2.3.7	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	300	309	Realisasi melebihi target karena meningkatnya partisipasi masyarakat.
2.3.8	Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen	2	2	Target tercapai karena penyajian data dilakukan secara akurat dan akuntabel.
2.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	2	Target tercapai karena pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan.
2.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan	Dokumen	12.000	576	Target belum tercapai karena penggunaan blangko

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				disesuaikan kebutuhan riil pelayanan.
2.4.2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	2	Realisasi melebihi target karena adanya tambahan kegiatan pembinaan.
2.4.3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	Target tercapai karena bimbingan teknis dilaksanakan sesuai rencana.
3	Program Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	16.250	46.242	Realisasi melebihi target karena meningkatnya pelaporan peristiwa penting dan optimalnya pelayanan.
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	
		Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	%	100	100	
3.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diproses	%	100	100	Target tercapai karena seluruh dokumen pencatatan sipil diproses sesuai standar.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	1.250	46.242	Realisasi melebihi target karena tingginya permohonan pencatatan peristiwa penting.
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1	1	Target tercapai karena peningkatan layanan dilaksanakan sesuai perencanaan.
3.1.3	Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	2	2	Target tercapai karena kegiatan pengolahan data dilaksanakan sesuai jadwal.
3.1.4	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	2	2	Target tercapai karena dokumen tata cara penyelenggaraan berhasil disusun.
3.1.5	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	1	1	Target tercapai karena pengadaan dokumen dilaksanakan sesuai kebutuhan.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kebutuhan					
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Peserta Sosialisasi yang Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100	100	Target tercapai karena koordinasi dan sosialisasi berjalan optimal.
3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	1	1	Target tercapai karena koordinasi dengan instansi terkait terlaksana.
3.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan	Laporan	1	0	Tidak terealisasi karena kegiatan belum menjadi prioritas tahun berjalan.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kot a	Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kot a				
3.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kot a dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kot a dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	1	0	Tidak terealisasi karena belum terdapat kebutuhan koordinasi lintas lembaga.
3.2.4	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	Target tercapai karena pelayanan aktif terlaksana sesuai rencana.
3.2.5	Sub Kegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	1	0	Tidak terealisasi karena tidak terdapat permintaan data dari perwakilan RI.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	0	Tidak terealisasi karena tidak terdapat kebutuhan fasilitasi.
3.2.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	1	0	Tidak terealisasi karena belum adanya pemanfaatan data pada tahun berjalan.
3.2.8	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	Target tercapai karena kegiatan sosialisasi terlaksana.
3.2.9	Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	2	0	Tidak terealisasi karena belum dilaksanakan kerja sama dengan mitra.
3.2.10	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Orang	300	309	Realisasi melebihi target karena meningkatnya partisipasi masyarakat.
3.2.11	Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait	Laporan	2	2	Target tercapai karena penyajian data dilakukan sesuai ketentuan.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil				
3.3	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Admindak untuk Pelayanan Pencatatan Sipil yang Dipelihara	%	100	100	Target tercapai karena pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai rencana.
3.3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	2	0	Tidak terealisasi karena penggunaan blangko disesuaikan kebutuhan pelayanan.
3.3.2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan	2	2	Target tercapai karena pembinaan dan pengawasan terlaksana.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.3.3	Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan	2	0	Tidak terealisasi karena kegiatan supervisi belum dilaksanakan.
3.3.4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2	2	Target tercapai karena bimbingan teknis dilaksanakan sesuai rencana.
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal	%	100	100	Target tercapai karena pemanfaatan SIAK dan inovasi pelayanan berjalan optimal.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain	%	100	100	
		Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal	%	100	100	
4.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	%	100	100	Target tercapai karena data kependudukan diolah dan dimanfaatkan secara optimal.
		Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan	%	100	100	
4.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	2	2	Target tercapai karena pengolahan data dilaksanakan sesuai rencana.
4.1.2	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	11	Realisasi melebihi target karena meningkatnya kerja sama pemanfaatan data.
4.1.3	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	2	0	Tidak terealisasi karena kegiatan inventarisasi belum dilaksanakan.
4.2	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,	Dokumen	1	1	Target tercapai karena dokumen tata cara penyelenggaraan berhasil disusun.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kependudukan	Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)				
4.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	1	1	Target tercapai karena penyusunan dokumen dilaksanakan sesuai perencanaan.
4.3	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	1	Target tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan.
4.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	1	Target belum tercapai karena koordinasi belum dilaksanakan secara optimal.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	n					
4.3.2	Sub Kegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dokumen	2	0	Tidak terealisasi karena tidak terdapat permintaan data.
4.3.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	5	Realisasi melebihi target karena meningkatnya kebutuhan fasilitasi.
4.3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	0	Tidak terealisasi karena belum dilaksanakan pemanfaatan data.
4.3.5	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	0	Tidak terealisasi karena kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan.
4.3.6	Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dokumen	2	0	Tidak terealisasi karena belum dilaksanakan kerja sama.
4.3.7	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku	Laporan	1	1	Target tercapai karena kegiatan KIE terlaksana.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan Masyarakat	Kepentingan dan Masyarakat				
4.3.8	Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	2	2	Target tercapai karena penyajian data dilakukan secara akurat.
4.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	Target tercapai karena pembinaan dan pengawasan dilaksanakan.
4.4.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	Target tercapai karena kegiatan pengawasan terlaksana.
4.4.2	Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kot a dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kot a dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi	Dokumen	1	0	Tidak terealisasi karena kegiatan supervisi belum dilaksanakan.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				
4.4.3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	1	Target tercapai karena bimbingan teknis dilaksanakan sesuai rencana.
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan	%	100	100	Target tercapai karena penyusunan dan pemanfaatan profil kependudukan berjalan optimal.
5.1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang Diterbitkan	%	100	100	Target tercapai karena penyusunan profil dilaksanakan sesuai perencanaan.
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	Target tercapai karena ketersediaan data kependudukan terpenuhi.
5.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1	2	Realisasi melebihi target karena adanya tambahan dokumen profil sesuai kebutuhan daerah.

Sumber: Dinas Dukcapil 2025

1.6. Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Secara umum, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Program Pengelolaan Profil Kependudukan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pada Program Pendaftaran Penduduk, sebagian besar indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan mencapai bahkan melampaui target. Hal ini terlihat dari realisasi jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan, penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, serta pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan adminduk serta efektivitas pelaksanaan layanan, termasuk melalui pendekatan jemput bola dan pelayanan aktif di masyarakat.

Demikian pula pada Program Pencatatan Sipil, realisasi jumlah dokumen hasil pencatatan peristiwa penting jauh melampaui target yang ditetapkan, serta persentase penyelesaian dokumen pencatatan sipil mencapai 100% sesuai standar waktu pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan sipil telah berjalan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berperan penting dalam menunjang kualitas data kependudukan. Seluruh indikator utama program, seperti pemanfaatan data kependudukan oleh pihak lain, penggunaan aplikasi SIAK, serta optimalisasi inovasi pelayanan, telah tercapai 100%. Kondisi ini mendukung tersedianya data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pelayanan dan perencanaan pembangunan.

Adapun Program Pengelolaan Profil Kependudukan juga berhasil mendukung pencapaian sasaran melalui penyusunan dan pemanfaatan profil kependudukan yang sesuai dengan target, sehingga memperkuat basis data dan analisis kependudukan daerah.

1.7. Program dan Kegiatan yang Menjadi Faktor Keterbatasan Capaian Sasaran Strategis I

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya belum mencapai target, khususnya pada kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi lintas instansi, kerja sama dengan pihak eksternal, serta fasilitasi dan pemanfaatan data kependudukan. Beberapa sub kegiatan menunjukkan realisasi nol atau di bawah target, yang disebabkan antara lain oleh keterbatasan waktu pelaksanaan, penyesuaian kebijakan dan prioritas pada masa transisi RPJMD, serta ketergantungan pada peran dan kesiapan instansi mitra.

Selain itu, terdapat pula beberapa sub kegiatan yang realisasinya jauh melampaui target, yang menunjukkan bahwa penetapan target awal masih perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan potensi dan kebutuhan riil pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat.

1.8. Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Sasaran Strategis I

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebesar Rp. 3.054.666.917 dengan realisasi sebesar Rp. 3.010.941.221. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	102,52 %	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
1			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
1.1			Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7.000.000	6.995.000	99,93
1.2			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-
1.3			Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	-	-
1.4			Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	902.785.000	885.789.330	98,12
1.5			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	-
1.6			Sub Kegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	-
1.7			Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	-
1.8			Sub Kegiatan	-	-	-

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk			
2			Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	-
2.1			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-
2.2			Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	-	-	-
3			Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
3.1			Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	19.800.000	17.300.000	87,37
3.2			Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.3			Sub Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Penduduk	-	-	-
3.4			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-
3.5			Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	-
3.6			Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-
3.7			Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-
3.8			Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-
4			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-
4.1			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.2			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-
4.3			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-
II			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
1			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil			
1.1			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	14.995.000	14.736.250	98,27
1.2			Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-
1.3			Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	-	-	-
1.4			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	11.779.832	11.257.000	95,56
1.5			Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	-	-	-
2			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1			Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	-	-
2.2			Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3			Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-
2.4			Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
2.5			Sub Kegiatan	-	-	-

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil			
2.6			Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
2.7			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
2.8			Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
2.9			Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
2.10			Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
2.11			Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
3			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
3.1			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.2			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
3.3			Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
3.4			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
III			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
1			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
1.1			Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	-
1.2			Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	9.622.500	8.400.000	87,30
1.3			Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-	-	-

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2			Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2.1			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admindak Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-
3			Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
3.1			Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-
3.2			Sub Kegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	-	-	-
3.3			Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.863.531.250	1.850.378.741,20	99,29
3.4			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	-
3.5			Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan	-	-	-

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Informasi Administrasi Kependudukan			
3.6			Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	-	-	-
3.7			Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	15.000.000	13.320.000	88,80
3.8			Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	-	-	-
4			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
4.1			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.058.835	15.119.400	71,80
4.2			Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan	-	-	-

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Basis Data Kependudukan			
4.3			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	185.734.500	184.359.900	99,26
IV			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
1			Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan			
1.1			Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	-
1.2			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	3.360.000	3.285.600	97,79
			TOTAL	3.054.666.917	3.010.941.221	98,57%

Sumber: Dinas Dukcapil 2025

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan data pada tabel kinerja dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai dengan sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 102,52%. Sementara itu, realisasi anggaran dari total pagu sebesar Rp.3.054.666.917 terealisasi Rp.3.010.941.221 atau 98,57%. Dengan membandingkan capaian kinerja terhadap realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = (\text{Capaian Kinerja} / \text{Realisasi Anggaran}) \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = (102,52\% / 98,57\%) \times 100\% = \pm 104,01\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan output dan outcome yang melebihi target kinerja dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal, sehingga dapat dinilai efisien.

Adapun analisis efisiensi dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran tercermin dari realisasi anggaran sebesar **98,57%**, yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja **102,52%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi anggaran. Efisiensi terutama didukung oleh optimalisasi belanja pada sub kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta bimbingan teknis dan fasilitasi pemanfaatan data kependudukan.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM dicapai melalui pemanfaatan aparatur secara optimal, peningkatan kompetensi melalui kegiatan bimbingan teknis, serta pembagian tugas yang proporsional sesuai fungsi dan kewenangan. Hal ini memungkinkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan jumlah personel.

3. Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu ditunjukkan dengan terlaksananya sebagian besar program dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Pelayanan administrasi kependudukan dapat diberikan secara tepat waktu kepada masyarakat, sehingga mendukung peningkatan capaian kinerja secara keseluruhan.

2. Sasaran II, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui 1 (Satu) indikator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Definisi operasional dari indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah nilai dari hasil evaluasi AKIP yang secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 88 Tahun 2021).

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 104,65% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Sasaran II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,00	70,78	108,89%

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah* diukur melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun pelaporan, ditetapkan target sebesar **65,00**, dengan realisasi capaian **70,78**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **108,89%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas Perangkat Daerah melampaui target yang telah ditetapkan, serta mencerminkan peningkatan kualitas sistem perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Peningkatan nilai SAKIP ini juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh peningkatan pemahaman aparatur terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dinilai sangat berhasil, dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada periode selanjutnya guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 3.8
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun n	Tahun n	Tahun n-1	Tahun n-2
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,00	70,78	55,80	60,02

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan tren peningkatan kinerja. Pada tahun **n-1**, nilai SAKIP tercatat sebesar 55,80, kemudian meningkat menjadi 60,02 pada tahun **n-2**, dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun **n** menjadi 70,78. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Perangkat Daerah. Dengan demikian, kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dinilai berhasil, dan diharapkan dapat terus ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 91,92% dari target tahun terakhir Renstra. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target Akhir Renstra

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Pencatatan Sipil
Terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,00	70,78	91,92 %

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar **77,00**, sedangkan realisasi pada tahun **n** mencapai **70,78**, sehingga tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar **91,92%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah telah berada pada jalur pencapaian target Renstra dan mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meskipun target akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai, hasil yang diperoleh pada tahun pelaporan menunjukkan tren peningkatan kinerja yang positif dan menjadi dasar yang kuat untuk mencapai target Renstra pada periode selanjutnya.

2.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten/Kota Tetangga

Perbandingan capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui posisi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dibandingkan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten tetangga dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tingkat nasional, data nilai SAKIP Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 belum tersedia sehingga belum dapat dijadikan pembanding secara kuantitatif.

Pada tingkat Provinsi Jawa Timur, nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 mencapai 91,92, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja sangat baik dan dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Kabupaten Blitar. Sementara itu, Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 memperoleh nilai SAKIP sebesar 70,78.

Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, capaian Kabupaten Blitar relatif sebanding, yaitu lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebesar 70,01, dan hampir setara dengan Kabupaten Lumajang Tahun 2025 sebesar 70,81. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas Kabupaten Blitar telah berada pada kategori baik, namun masih perlu ditingkatkan agar mendekati capaian tingkat provinsi.

Tabel 3.10
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

NO.	DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI
1	DIRJENDUKCAPIL	Meningkatnya		2025	tidak ditemukan
2	KAB. BLITAR	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2025	70,78
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur			2025	91,92
4	KAB. NGANJUK			2024	70,01
5	KAB. LUMAJANG			2025	70,81

Sumber:

<https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/dashboard/sakip>

LKJIP Dispendukcapil Kab. Nganjuk 2024

LHE AKIP Kab. Lumajang 2025

2.3. Upaya dalam Mengungkit Kinerja Sasaran Strategis II

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang diarahkan pada penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja melalui penyelarasan antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Kinerja, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis. Selain itu, dilakukan penguatan pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja yang lebih terukur, relevan, dan berorientasi hasil (outcome).

Dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan kinerja, Disdukcapil juga meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui penyusunan LKjIP yang lebih informatif, analitis, dan berbasis data, serta didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Upaya lain yang turut mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pembinaan dan pendampingan teknis terkait SAKIP, serta penguatan koordinasi internal dan lintas perangkat daerah. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kinerja akuntabilitas Perangkat Daerah dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.4. Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kendala yang dihadapi antara lain masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian aparatur terhadap konsep SAKIP yang berorientasi pada hasil (outcome), sehingga penyusunan indikator kinerja dan perencanaan kinerja belum sepenuhnya optimal. Selain itu, konsistensi dalam penyelarasan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja masih memerlukan penguatan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perencanaan dan evaluasi kinerja, serta tingginya beban tugas pelayanan publik yang berdampak pada terbatasnya waktu aparatur untuk melakukan analisis kinerja secara mendalam. Di samping itu, dukungan sistem informasi kinerja yang terintegrasi belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pengumpulan dan pengolahan data kinerja secara cepat dan akurat.

Berbagai kendala dan hambatan tersebut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi internal, serta penyempurnaan sistem dan mekanisme pengelolaan kinerja pada periode selanjutnya.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	135,45	Capaian melebihi target karena seluruh kegiatan pendukung terlaksana optimal dan didukung perencanaan serta koordinasi yang efektif.
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	6	6	Target tercapai karena seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	6	6 (Renstra, Renja 2026,	Target tercapai

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
	Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah			Renja Perubahan 2025, RKA, DPA)	karena seluruh dokumen perencanaan disusun lengkap dan tepat waktu.
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2 (RKA-P N-0, RKA N+1)	Target tercapai karena proses koordinasi dan penyusunan dokumen RKA berjalan efektif.
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	3 (LKPJ, LKJIP, LPPD)	Realisasi melebihi target karena adanya tambahan laporan kinerja yang wajib disusun.
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Laporan	3	3	Target tercapai karena pengelolaan administrasi keuangan dilaksanakan tertib dan tepat waktu.
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	24 PNS 9 PPPK	Target tercapai karena seluruh ASN menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	8	9 (Laporan keuangan, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Lap. BMD Sem. I dan II, Lap. Progres Keuangan Sem. I dan II)	Realisasi melebihi target karena adanya tambahan dokumen dan laporan keuangan pendukung.

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	85	72	Realisasi belum optimal karena adanya penyesuaian data kepegawaian dan kebutuhan layanan
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Target tidak tercapai karena penyesuaian prioritas kebutuhan dan efisiensi anggaran.
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	24	Target tercapai karena seluruh pegawai mengikuti diklat sesuai rencana.
1.3.3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	73	72	Realisasi sedikit di bawah target karena penyesuaian kehadiran peserta.
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Bulan	12	12	Target tercapai karena kegiatan administrasi umum terlaksana secara berkelanjutan.
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Target tercapai atau melebihi target karena meningkatnya kebutuhan pelayanan dan operasional.
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10 (ATK, bahan cetak, bahan komputer, sewa kendaraan, absen digital, perlengkapan komputer, perlengkapan	

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
					jaringan, CCTV, instalasi jaringan, peralatan operasional)	
1.4. .3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	
1.4. .4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	
1.4. .5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	
1.4. .6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	
1.4. .7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	59 (35 rapat formal, 24 evaluasi rutin)	
1.4. .8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6.000	7.411 (2.442 arsip manual, 4.969 arsip digital)	
1.4. 9	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	2 - Mebel - Peralatan dan mesin lainnya	Realisasi melebihi target karena adanya tambahan kebutuhan sarana penunjang pelayanan.
1.5. 1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	Target tercapai karena pengadaan sesuai rencana dan kebutuhan.
1.5. 2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	4 (Sofa, kursi kerja, kursi	Realisasi melebihi target

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
					rapat, meja kerja)	karena tambahan kebutuhan mebel pelayanan.
1.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	14 (PC 4 ; Laptop, 5; Printer 5)	Realisasi melebihi target karena peningkatan kebutuhan perangkat kerja.
1.5.4	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3 (Sudah terpenuhi dari Sub Kegiatan lain berupa pengadaan backdrop ruang pelayanan Dinas Dukcapil, TLA Srengat dan TLA Wlingi)	Realisasi melebihi target karena pemenuhan kebutuhan melalui optimalisasi sub kegiatan lain.
1.5.5	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	18 (Sudah terpenuhi dari Sub Kegiatan lain berupa penyediaan mebel (4) dan peralatan kantor (14)	
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	Target tercapai karena seluruh jasa penunjang tersedia selama tahun berjalan.
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	Target tercapai atau melebihi target karena meningkatnya intensitas pelayanan.
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	11	12	

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
	Kantor	Kantor yang Disediakan				
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	Target tercapai karena pemeliharaan dilaksanakan rutin dan sesuai kebutuhan.
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	24 (Terdiri dari : 5 kendaraan operasional ; 14 kendaraan fungsional ; 5 kendaraan jabatan roda 2)	Realisasi melebihi target karena bertambahnya kendaraan yang dipelihara.
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	55 (Pemeliharaan PC, laptop, printer, AC, genset, listrik)	Realisasi melebihi target karena meningkatnya jumlah peralatan yang dipelihara.
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3 (Gedung TLA Srengat, TLA Wlingi, Dukcapil Kanigoro)	Target tercapai karena pemeliharaan mendukung kelancaran pelayanan.
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	3 (Penyediaan BBM untuk 3 unit Genset)	

2.5. Anggaran Program dan Kegiatan dalam Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh berbagai kegiatan dan sub kegiatan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan, jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah.

Pada tahun pelaporan, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp6.686.627.533, dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.363.782.494 atau **95,17%**. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel, serta mendukung capaian kinerja sasaran yang mencapai **108,79%**.

Realisasi anggaran terbesar terdapat pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, khususnya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang berperan penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Selain itu, dukungan anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum, Penyediaan Jasa Penunjang, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah turut memastikan terselenggaranya pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah secara optimal.

Adapun sub kegiatan dengan realisasi di bawah 100% umumnya disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta penghematan belanja tanpa mengurangi output dan kualitas layanan. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran telah mendukung pencapaian sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

N o	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	108,79%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.116.000	1.100.500	98,61
1.2			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
1.3			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.1			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.997.721.400	3.785.337.708	94,69
2.2			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	648.400	502.500	77,50
3			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
3.1			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.2			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
3.3			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
4			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4.1			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.971.800	11.870.942	99,16
4.2			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.762.700	243.666.613	99,15

N o	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4. 3			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.325.133	28.255.618	90,20
4. 4			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.103.650	9.370.253	92,74
4. 5			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.456.250	26.745.350	93,99
4. 6			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.260.000	3.941.000	38,41
4. 7			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.535.500	199.616.856	85,84
4. 8			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.000.000	44.000.000	97,78
4. 9			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-
5			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5. 1			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
5. 2			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	61.922.200	60.952.320	98,43
5. 3			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.064.900	211.288.500	92,64
5. 4			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5. 5			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
6			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6. 1			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.582.400	4.462.467	97,38
6. 2			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.859.650	142.898.318	91,68

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.3			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.425.600	1.254.833.698	99,56
7			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.096.400	85.193.795	87,74
7.2			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.020.000	25.168.700	78,60
7.3			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.760.000	222.902.356,39	97,02
7.4			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.995.550	1.675.000	83,94
				6.686.627.533	6.363.782.494	95,17%

Sumber: Dinas Dukcapil 2025

2.6. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis II

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Dengan capaian kinerja sebesar **108,79%**, realisasi anggaran hanya mencapai **95,17%** dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dilampaui tanpa menggunakan seluruh anggaran yang tersedia.

Efisiensi tersebut dicapai melalui pengendalian pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penerapan prinsip efisiensi dalam belanja operasional dan administrasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran telah efektif dalam mendukung peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan di atas, dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar **108,79%**, sedangkan realisasi anggaran sebesar **95,17%**. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memiliki nilai efisiensi sebesar **13,62%**.

Penjelasan terkait analisis efisiensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Efisiensi Anggaran**

Efisiensi anggaran tercermin dari capaian kinerja yang melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara hemat dan optimal tanpa mengurangi kualitas output.

2. **Efisiensi SDM**

Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara optimal melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan koordinasi, serta pemanfaatan kompetensi aparatur, sehingga target kinerja dapat dicapai tanpa penambahan kebutuhan SDM.

3. **Efisiensi Waktu**

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan, didukung oleh perencanaan yang matang dan monitoring berkala, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Blitar untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.13
Realisasi Keuangan

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN		
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.686.627.533,00	6.363.782.494,39	95,17
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	929.585.000,00	910.084.330,00	97,90
		Program Pencatatan Sipil	26.774.832,00	25.993.250,00	97,08
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.094.947.085,00	2.071.578.041,20	98,88
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.360.000,00	3.285.600,00	97,79
J U M L A H			9.741.294.450,00	9.374.723.715,59	96,24

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025.

Tabel 3.14.
Analisis Permasalahan, Kendala, dan Upaya Penyelesaian Realisasi Keuangan

No	Sasaran	Program	Permasalahan / Kendala	Upaya Penyelesaian Masalah / Kendala
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana penunjang operasional belum optimal dan memerlukan biaya pemeliharaan tinggi. ▪ Beberapa kegiatan pendukung administrasi tidak dapat dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi penggunaan sumber daya internal agar kegiatan tetap berjalan efektif meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.

No	Sasaran	Program	Permasalahan / Kendala	Upaya Penyelesaian Masalah / Kendala
			sepenuhnya akibat penyesuaian kebutuhan organisasi dan kebijakan efisiensi anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian prioritas kegiatan sesuai kebutuhan organisasi.
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan dan Kecamatan belum optimal. Perbedaan implementasi standar pelayanan, khususnya kecepatan layanan dan kemampuan petugas, menyebabkan pelayanan tidak tuntas dan menumpuk di Dinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas Petugas Registrasi Desa/Kelurahan dan Operator Kecamatan. Optimalisasi sosialisasi tata cara dan persyaratan pelayanan pendaftaran penduduk kepada masyarakat.
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan pencatatan sipil di Desa/Kelurahan belum optimal. Perbedaan pemahaman dan kemampuan petugas dalam penerapan standar pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas Petugas Registrasi Desa/Kelurahan. Optimalisasi sosialisasi tata cara dan persyaratan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat.
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan standar internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) membutuhkan sumber daya besar. Peralatan teknologi informasi memerlukan pemeliharaan dan pengembangan dengan biaya tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas perencanaan anggaran untuk implementasi SMKI. Peningkatan kapasitas SDM pengelola sistem informasi. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia.
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Data kependudukan dirilis per semester sehingga penyusunan profil tidak dapat dilakukan secara real time. Penyusunan profil masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Proses manual memerlukan waktu lama dan berpotensi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian jadwal penyusunan profil dengan rilis data semesteran. Optimalisasi koordinasi internal antarbidang. Pemanfaatan data yang tersedia secara lebih efektif. Perencanaan pengembangan

No	Sasaran	Program	Permasalahan / Kendala	Upaya Penyelesaian Masalah / Kendala
			kesalahan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan integrasi data lintas bidang. 	aplikasi pengelolaan profil kependudukan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas SDM.

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Analisis Permasalahan, Kendala, dan Upaya Penyelesaian dalam Realisasi Keuangan

Berdasarkan data realisasi anggaran, Dispendukcapil mencatat tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,24% dari total pagu Rp.9.741.294.450,00, dengan realisasi Rp.9.374.723.715,20. Secara umum, realisasi keuangan menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, meskipun masih terdapat sejumlah kendala pada masing-masing program yang berdampak pada belum optimalnya penyerapan anggaran.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Realisasi: 95,17%)

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada program ini antara lain sarana dan prasarana penunjang operasional yang belum optimal serta membutuhkan biaya pemeliharaan yang relatif tinggi. Selain itu, sebagian kegiatan pendukung administrasi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya akibat adanya penyesuaian kebutuhan organisasi serta kebijakan efisiensi anggaran selama tahun berjalan. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya atau dikurangnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui optimalisasi penggunaan sumber daya internal, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif meskipun dengan anggaran yang lebih efisien. Disamping itu, dilakukan penyesuaian prioritas kegiatan agar tetap mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah.

2. Program Pendaftaran Penduduk (Realisasi: 97,90%)

Permasalahan utama pada program ini adalah belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Perbedaan implementasi standar pelayanan, khususnya terkait kecepatan layanan dan kemampuan petugas, menyebabkan sebagian pelayanan tidak tuntas di tingkat bawah dan akhirnya menumpuk di Dinas. Hal ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pemanfaatan anggaran.

Upaya penyelesaian yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas Petugas Registrasi Desa/Kelurahan dan Operator Kecamatan, serta optimalisasi sosialisasi tata cara dan persyaratan pelayanan pendaftaran penduduk kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelayanan dapat lebih merata dan beban pelayanan di Dinas dapat dikurangi.

3. Program Pencatatan Sipil (Realisasi: 97,08%)

Kendala yang dihadapi hampir serupa dengan program pendaftaran penduduk, yaitu belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil di tingkat Desa/Kelurahan. Perbedaan pemahaman dan kemampuan petugas dalam menerapkan standar pelayanan menyebabkan proses pelayanan tidak berjalan optimal dan berdampak pada penyerapan anggaran yang belum maksimal.

Langkah penyelesaian yang dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, serta optimalisasi sosialisasi tata cara dan persyaratan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat, sehingga proses pelayanan dapat lebih cepat, tepat, dan sesuai standar.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Realisasi: 98,88%)

Permasalahan yang dihadapi dalam program ini adalah kebutuhan penerapan standar internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang memerlukan sumber daya besar, baik dari sisi anggaran maupun SDM. Selain itu, sebagian peralatan teknologi informasi telah memasuki masa pemeliharaan dan pengembangan sistem yang membutuhkan biaya cukup tinggi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan prioritas perencanaan anggaran guna mendukung implementasi SMKI dan penguatan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem informasi, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif dan efisien.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Realisasi: 97,79%)

Permasalahan yang dihadapi pada program ini meliputi keterbatasan ketersediaan data kependudukan yang dirilis secara berkala per semester, sehingga penyusunan profil kependudukan tidak dapat dilakukan secara real time. Selain itu, proses penyusunan profil masih dilakukan secara manual karena belum tersedianya aplikasi khusus, yang berdampak pada lamanya waktu penyusunan, potensi kesalahan pengolahan data, serta tingginya kebutuhan ketelitian dan SDM. Keterbatasan integrasi data lintas bidang juga menyebabkan perlunya verifikasi dan penyesuaian data secara berulang.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan penyesuaian jadwal penyusunan profil kependudukan sesuai periode rilis data semesteran, optimalisasi koordinasi internal antarbidang dalam pengumpulan dan validasi data, serta pemanfaatan data yang telah tersedia secara lebih efektif. Ke depan, direncanakan pengembangan atau pengusulan aplikasi pengelolaan profil kependudukan serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengolahan dan analisis data.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	66,19%	67,85%	102,50%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,00 (B)	70,70 (BB)	107,69	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja PD				105,09	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Dukcapil 2025

B. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja sasaran, dapat diketahui bahwa seluruh kinerja Sasaran telah melampaui target. Namun pada kedua Sasaran yang ada, yaitu : “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” maupun “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” masih ada yang perlu untuk menjadi perhatian sehingga kinerja pada tahun berikutnya semakin baik. Oleh karena itu maka perlu adanya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala/permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4.3
Rencana Tindak Lanjut

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindaklanjut
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Petugas Registrasi Desa/Kelurahan dan Operator Kecamatan, agar penerapan standar pelayanan dapat berjalan seragam. 2. Optimalisasi sosialisasi tata cara dan persyaratan pelayanan kepada masyarakat serta penguatan pembinaan dan pengawasan pelayanan di tingkat bawah, sehingga dapat mengurangi penumpukan layanan di Dinas dan meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh. 3. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi melalui optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia dan perencanaan pengembangan aplikasi pendukung, khususnya untuk pengelolaan profil kependudukan 4. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data, serta penguatan koordinasi dan integrasi data antar bidang guna meningkatkan akurasi, keamanan, dan pemanfaatan data kependudukan. 5. Optimalisasi capaian IKD dengan mengimplementasikan kewajiban bagi penduduk yang memenuhi syarat ketentuan untuk aktivasi IKD saat proses pelayanan publik.
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan capaian kinerja dan kendala yang dihadapi, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penguatan perencanaan dan penganggaran melalui penetapan prioritas kegiatan yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan riil organisasi. 2. dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta peningkatan efisiensi biaya pemeliharaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. 3. Monitoring dan evaluasi kinerja akan diperkuat untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

Sumber : Dinas Dukcapil 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., M.M**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINI SYARIFAH**
Jabatan : Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


RINI SYARIFAH

Blitar, 31 Januari 2025
Pihak Pertama,


TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19770803 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP El	98,75%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	94%
3	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (SAKIP OPD)	Nilai SAKIP OPD	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.256.462.507,00	APBD
2. Pendaftaran Penduduk	Rp 1.231.855.000,00	APBD
3. Pencatatan Sipil	Rp 28.944.300,00	APBD
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 1.406.368.835,00	APBD
5. Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 3.360.000,00	APBD

JUMLAH Rp 8.926.990.642,00

Bupati

RINI SYARIFAH

Blitar, 31 Januari 2025
 Kepala Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Blitar

TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770803 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., M.M

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. RIJANTO, M.M

Jabatan : Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. RIJANTO, M.M

Blitar, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama,

TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19770803 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66,19%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,00

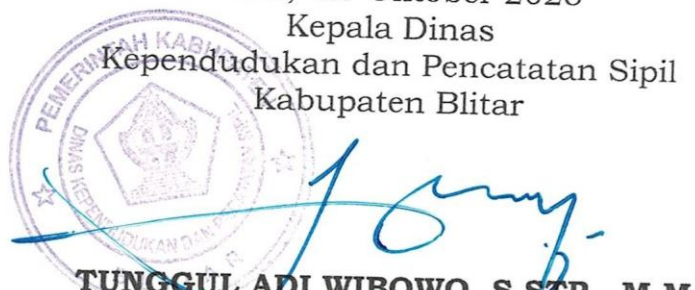
Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.686.627.533,00	APBD
2. Pendaftaran Penduduk	Rp 929.585.000,00	APBD
3. Pencatatan Sipil	Rp 26.774.832,00	APBD
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 2.094.947.085,00	APBD
5. Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 3.360.000,00	APBD
JUMLAH		
	Rp 9.741.294.450,00	

Bupati,



Drs. H. RIJANTO, M.M

Blitar, 23 Oktober 2025
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blitar



TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19770803 199703 1 005